



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOPI EKO JATI WIBOWO
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 234560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/294 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 3.550.000.000
4. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **990.000.000**

1. MOTOR, HONDA PLETHUK SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, VESPA P150X SPM/SCOOTER Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOBIL, OMODA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 402.000.000
4. MOBIL, BRIO RS CITY CAR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. MOBIL, PAJERO SPORT MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **74.295.000**



D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 238.233.932

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.182.528.932

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.182.528.932

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.